

**IMPLEMENTASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DI DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIDENRENG
RAPPANG: ANALISIS FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT**

Rezky Ahmadi^{1(a)}, Erfina^{2(b)}, Muhammad Arisal Asad^{3(c)}, Sapri^{4(d)}, Herman Dema^{5(e)}

^{1,2,3,4}Jurusan Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

⁵Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

^{a)}rezkyahmadi77@gmail.com, ^{b)}erfinafisip.05@gmail.com, ^{c)}arisalasad@yahoo.co.id,

^{d)}sapritajuddin3@gmail.com, ^{e)}hermandema1010@gmail.com

**INFORMASI
ARTIKEL**

Article History:

Dikirim:

01-02-2025

Diterbitkan Online:

01-03-2025

Kata Kunci:

Identitas Kependudukan
Digital, Implementasi
Kebijakan, Transformasi
Digital

Keywords:

Digital Population Identity,
Policy Implementation,
Digital Transformation

Corresponding Author:

rezkyahmadi77@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan pengambatnya dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III, yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode Miles dan Huberman dengan bantuan perangkat lunak NVivo 12 Plus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi IKD belum optimal, dengan tingkat adopsi hanya 2,08% dari total penduduk yang telah memiliki e-KTP. Faktor pendukung meliputi kompetensi sumber daya manusia yang memadai dan ketersediaan infrastruktur teknologi dasar. Sebaliknya, faktor penghambat meliputi rendahnya kesadaran masyarakat, sosialisasi yang belum merata, keterbatasan jaringan internet, serta prosedur aktivasi yang masih mengharuskan kehadiran langsung di kantor Disdukcapil. Penelitian ini memiliki kebaruan dalam mengkaji implementasi IKD di daerah dengan keterbatasan infrastruktur dan literasi digital yang rendah, yang belum banyak dibahas dalam studi sebelumnya. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam menyusun strategi optimalisasi implementasi IKD, terutama dalam memperluas jangkauan sosialisasi dan meningkatkan infrastruktur digital. Dari segi teoretis, temuan ini memperkuat model implementasi kebijakan Edward III dengan menyoroti interaksi kompleks antara komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam konteks kebijakan digital.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Digital Population Identity (IKD) at the Population and Civil Registration Office of Sidenreng Rappang Regency and identify the supporting and inhibiting factors using Edward III's policy implementation theory, which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The approach used was descriptive qualitative with data collection techniques through observation, semi-structured interviews, and documentation. The data obtained were analyzed using the Miles and Huberman method with the help of NVivo 12 Plus software. The results show that the implementation of IKD has not been optimal, with an adoption rate of only 2.08% of the total population who have e-KTP. Supporting factors include adequate human resource competencies and the availability of basic technological infrastructure. In contrast, inhibiting factors include low public awareness, uneven socialization, limited internet network, and activation procedures that still require direct presence

at the Disdukcapil office. This research is novel in examining the implementation of IKD in areas with limited infrastructure and low digital literacy, which has not been widely discussed in previous studies. Practically, the results of this study can serve as a reference for local governments in developing strategies to optimize IKD implementation, especially in expanding the reach of socialization and improving digital infrastructure. From a theoretical perspective, the findings strengthen Edward III's policy implementation model by highlighting the complex interactions between communication, resources, disposition, and bureaucratic structure in the context of digital policy.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jmiap.v7i1.1178>

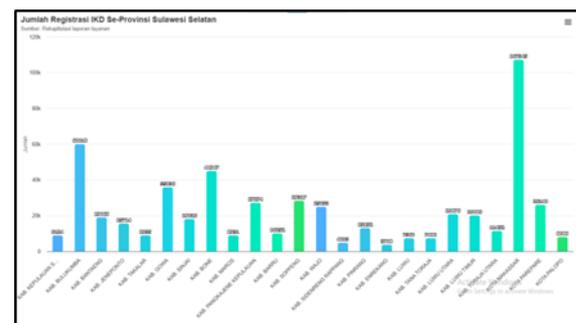
PENDAHULUAN

Transformasi digital menjadi prioritas utama dalam modernisasi pelayanan publik di Indonesia (Hadi et al., 2024) (Amrih et al., 2024). Salah satu wujud nyata dari upaya ini adalah penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 dan diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 menegaskan pentingnya digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi, integrasi dan aksesibilitas layanan publik (Azzahra & Rudiana, 2024). IKD sebagai bagian dari Strategi Transformasi Digital Nasional 2020-2024, dirancang untuk memberikan kemudahan akses terhadap dokumen kependudukan secara online, mengurangi resiko kehilangan dokumen fisik, serta meningkatkan keamanan data berbasis teknologi (Nuraeni & Syahrudin, 2024).

Proses implementasi IKD dilakukan secara bertahap dan belum diwajibkan bagi seluruh penduduk (Nurdiana & Ayumi, 2024). Bagi masyarakat yang telah memiliki e-KTP, diperbolehkan membuat IKD melalui aplikasi resmi pemerintah (Zahro & Wahyuni, 2024). Sistem ini tidak hanya menyediakan kemudahan dalam pengelolaan data kependudukan, tetapi juga mendukung verifikasi identitas secara cepat melalui fitur seperti QR code dan autentikasi biometrik. Dengan fitur-fitur ini IKD dapat meningkatkan kepercayaan terhadap keamanan dan integrasi data dalam sistem digital pelayanan publik (Bella & Widodo, 2023).

Meskipun memiliki manfaat yang signifikan, tingkat adopsi IKD di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama di wilayah dengan literasi digital rendah dan keterbatasan infrastruktur teknologi (Yulanda & Frinaldi, 2023). Kabupaten Sidenreng Rappang menjadi contoh nyata

dengan tingkat adopsi IKD yang hanya mencapai 2,08% dari jumlah penduduk yang telah memiliki e-KTP di akhir tahun 2024, jauh dibawah target nasional yaitu sebesar 30%. Fenomena ini menarik untuk diteliti karena bertentangan dengan indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi kabupaten ini yang relatif baik di tingkat provinsi.



Gambar 1. Jumlah Registrasi IKD Sulsel

Sumber: Website Disdukcapil Sulsel

Berdasarkan gambar tersebut, data registrasi IKD di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan kesenjangan yang signifikan. Kota Makassar mencatat angka tertinggi sebesar 107.345 registrasi, sedangkan Kabupaten Sidenreng Rappang hanya mencapai 4.813 registrasi, menempatkannya di posisi kedua terendah setelah Kabupaten Enrekang (Disdukcapil Sulsel, 2024). Disparitas ini mencerminkan perbedaan infrastruktur teknologi, literasi digital dan sosialisasi program antara daerah perkotaan dan pedesaan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami hambatan dalam implementasi IKD di Kabupaten Sidenreng Rappang, yang mencakup 11 kecamatan dengan tingkat urbanisasi yang bervariasi.

Berdasarkan hasil observasi awal terdapat beberapa masalah dalam implementasi IKD di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu, 1) kurangnya sosialisasi program yang terstruktur, terutama di wilayah pedesaan; 2) keterbatasan infrastruktur digital dalam pengelolaan sistem IKD, 3) resistensi masyarakat terhadap perubahan sistem, yang dipengaruhi oleh budaya dan tingkat pemahaman teknologi; dan 4) belum adanya regulasi khusus di tingkat daerah yang mengatur detail teknis terkait implementasi IKD.

Penelitian sebelumnya telah mengkaji implementasi IKD di berbagai daerah. (Syafa Armia Zafira & Oktarizka Reviandani, 2024) mengidentifikasi bahwa kendala utama terletak pada rendahnya pemahaman masyarakat meskipun infrastruktur tersedia. Penelitian oleh (Muhammad Rusydi & Dadang Mashur, 2024) menunjukkan bahwa keterbatasan akses teknologi menjadi hambatan utama, terutama di wilayah pinggiran. Sebaliknya, penelitian oleh (Salopah et al., 2024) melaporkan keberhasilan implementasi IKD dengan dukungan masyarakat yang kuat, sementara penelitian (Sasongko, 2023) menekankan pentingnya sosialisasi intensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang IKD.

Berdasarkan kajian literatur yang telah dipaparkan, dapat diidentifikasi adanya *research gap* yang signifikan dalam studi implementasi IKD. Setelah melakukan analisis mendalam terhadap penelitian-penelitian terdahulu, ditemukan bahwa mayoritas kajian yang ada cenderung berpusat pada konteks perkotaan dengan infrastruktur teknologi yang memadai dan tingkat literasi yang relatif tinggi. Kesenjangan penelitian ini semakin nyata ketika minimnya eksplorasi terhadap daerah-daerah dengan karakteristik berupa keterbatasan akses teknologi dan tingkat literasi digital yang rendah.

Kesenjangan penelitian juga terlihat dari belum komprehensifnya kajian yang mengeksplorasi interelasi antara faktor urbanisasi, disparitas sosial-ekonomi antar wilayah, serta pola interaksi masyarakat dengan teknologi dalam konteks adopsi IKD. Dinamika masyarakat yang beragam berdasarkan latar belakang budaya, tingkat pendidikan dan pengalaman terhadap teknologi belum mendapatkan perhatian yang memadai dalam kajian-kajian sebelumnya. Padahal, faktor-faktor ini sangat mempengaruhi tidak hanya kemampuan teknis masyarakat dalam mengadopsi IKD, tetapi juga kemauan dan

tingkat kepercayaan mereka terhadap program ini.

Selain itu, belum banyak penelitian yang menganalisis proses dan efektivitas implementasi kebijakan transisi dari sistem identitas kependudukan konvensional ke digital dalam konteks daerah dengan karakteristik dan tantangan spesifik. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi IKD dengan mempertimbangkan kompleksitas di wilayah penelitian.

Kebaruan ilmiah penelitian ini terletak pada fokusnya untuk mengeksplorasi implementasi IKD di wilayah dengan tantangan geografis, demografis dan sosial yang kompleks. Pendekatan yang digunakan mempertimbangkan berbagai faktor mulai dari kebijakan, infrastruktur, hingga karakteristik masyarakat, yang belum banyak dieksplorasi dalam penelitian sebelumnya.

Untuk menganalisis kompleksitas permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III sebagai kerangka analisis. Pemilihan teori ini didasarkan pada komprehensivitas variabel yang ada dalam menganalisis implementasi kebijakan di tingkat daerah. Empat variabel tersebut yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi, memberikan kerangka yang sistematis untuk menganalisis berbagai aspek implementasi, mulai dari proses sosialisasi hingga struktur kelembagaan (Fauzan, 2024).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses implementasi IKD di Kabupaten Sidenreng Rappang, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambatnya, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk optimalisasi implementasi IKD di wilayah dengan tantangan unik. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi nyata terhadap literatur dan praktik kebijakan transformasi digital di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut (Sugiyono, 2020), penelitian kualitatif adalah metode yang meneliti objek dalam kondisi alamiah, dimana peneliti menjadi instrumen kunci. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai fenomena yang diteliti

(Zellatifanny & Mudjiyanto, 2018). Penelitian dilaksanakan selama 2 bulan, mulai tanggal 4 Desember 2024 hingga 4 Februari 2025.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur untuk menggali informasi mendalam dari informan mengenai proses implementasi IKD. Observasi dilakukan secara non-partisipatif dengan mengamati langsung proses pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dokumentasi mencakup pengumpulan data sekunder seperti laporan resmi, kebijakan terkait dan dokumen pendukung lainnya yang relevan (Ahmad, 2015).

Analisis data mengikuti tahapan Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, serta verifikasi atau penarikan kesimpulan (Abdussamad, 2021). Untuk mendukung proses analisis, digunakan aplikasi NVivo 12 Plus yang membantu pengorganisasian data, pengkodean dan identifikasi tema-tema utama, sehingga meningkatkan keandalan dan efisiensi analisis (Priyatni et al., 2020).

Pada tahapan awal analisis data menggunakan Nvivo 12 Plus, langkah pertama yang dilakukan adalah mengolah data dengan membuka aplikasi dan membuat proyek baru. Untuk memulai proyek baru, pilih *Blank Project*, kemudian isi judul proyek, deskripsi, serta nama file lalu klik "OK" untuk menyimpan pengaturan awal. Setelah proyek dibuat, langkah berikutnya adalah mengimpor dan mengumpulkan file yang diperlukan. Melalui menu utama, pengguna dapat memilih fitur *import* untuk memasukkan berbagai jenis file.

Setelah data berhasil diimpor, langkah selanjutnya adalah proses *coding*, yang bertujuan untuk mengorganisasi serta mengkategorikan data guna mengidentifikasi pola dan tema utama. Pengguna perlu membuat node sebagai kategori untuk mengelompokkan data yang dikodekan. Proses ini dimulai dengan mengklik kanan pada bagian *Nodes* di panel navigasi kiri, lalu memilih *New Node* dan memberi nama sesuai kategori yang relevan. Setelah kategori atau *node* dibuat, pengguna dapat mulai mengkodekan data secara manual dengan membuka dokumen yang telah diimpor, memilih bagian teks yang relevan, lalu mengklik kanan dan memilih *Code Selection*.

Untuk analisis lebih lanjut, digunakan fitur *Matrix Coding Query* yang memungkinkan

perbandingan antara kategori atau tema yang telah dikodekan, yang ditampilkan dalam bentuk tabel atau grafik. Untuk menggunakan fitur ini, pengguna dapat memilih menu *Query* lalu memilih *Matrix Coding Query*. Setelah itu, kategori atau *node* yang ingin dibandingkan dapat ditambahkan, dan setelah semua parameter ditetapkan, pengguna cukup mengklik *Run Query*.

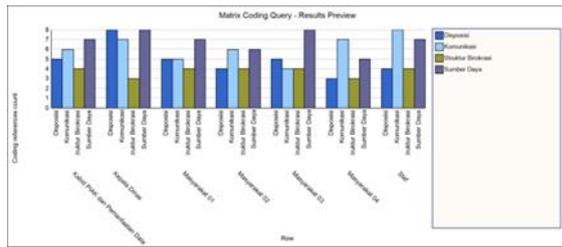
Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan penelitian (Amin et al., 2023). Informan terdiri dari tujuh orang, yaitu tiga pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terlibat langsung dalam implementasi IKD dan empat masyarakat pengguna layanan.

Informan dari Disukcapil dipilih dengan kriteria spesifik yaitu, pendidikan minimal S1, pengalaman kerja minimal tiga tahun di bidang administrasi kependudukan dan memiliki pemahaman mendalam mengenai program IKD. Sementara itu, informan dari masyarakat dipilih dengan mempertimbangkan keragaman, dengan kriteria, berusia antara 17-55 tahun, tingkat pendidikan minimal SMA/ sederajat, sudah terdaftar atau menggunakan IKD, serta berasal dari wilayah dengan karakteristik berbeda, yaitu perkotaan dan pedesaan. Pemilihan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan relevan mengenai fenomena yang diteliti (Asrulla et al., 2023).

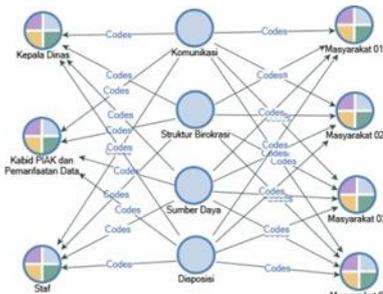
Keabsahan data diuji melalui triangulasi. Teknik ini memastikan bahwa data yang dikumpulkan konsisten, valid dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah (Rijali, 2018). Proses triangulasi dilakukan melalui dua teknik, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber dilaksanakan dengan membandingkan data dari beragam informan kunci yang meliputi pejabat Disukcapil (Kepala Dimas, Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data dan staf operasional) serta masyarakat.

Triangulasi waktu diterapkan melalui pengumpulan data pada periode yang berbeda (pagi dan sore) serta hari yang berbeda untuk memastikan konsistensi dan mengidentifikasi variasi respon pada waktu tertentu. Dengan pendekatan yang sistematis ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan relevan terhadap fenomena yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN



Gambar 2. Visualisasi Diagram Informan
Sumber: Nvivo 12 Plus



Gambar 3. Visualisasi Project Map
Sumber: Nvivo 12 Plus

Penelitian tentang implementasi IKD di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang menghasilkan temuan komprehensif yang dianalisis menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan Edward III. Berdasarkan gambar visualisasi diagram, hasil analisis matriks menggunakan NVivo menunjukkan distribusi referensi coding yang signifikan, dimana aspek sumber daya mendominasi sebesar 31,8%, diikuti komunikasi 28,5%, disposisi 22,5% dan struktur birokrasi 17,2%. Distribusi ini menggambarkan bahwa aspek komunikasi dan sumber daya menjadi faktor kritis dalam implementasi IKD di wilayah tersebut.

Implementasi IKD di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan keterkaitan antara komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dalam model Edward III. Komunikasi menjadi faktor utama yang memengaruhi disposisi masyarakat dan pegawai, dimana sosialisasi yang efektif meningkatkan pemahaman dan penerimaan terhadap IKD. Namun, keterbatasan akses teknologi di daerah pedesaan menghambat penyebaran informasi dan menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat. Sumber daya, terutama infrastruktur dan anggaran, juga berperan penting dalam mendukung komunikasi dan efektivitas birokrasi. Keterbatasan jaringan internet dan minimnya alokasi anggaran

membatasi sosialisasi. Meskipun pegawai telah memiliki kompetensi yang baik, jumlah tenaga operator yang terbatas menjadi kendala dalam pelaksanaan program. Struktur birokrasi yang jelas dengan SOP yang terorganisir meningkatkan efisiensi koordinasi, tetapi masih dipengaruhi oleh komitmen pegawai dalam menjalankan kebijakan. Sebaliknya, pegawai yang memiliki disposisi positif lebih mudah beradaptasi dengan regulasi dan memperkuat koordinasi antar unit. Dengan demikian komunikasi dan sumber daya menjadi faktor dominan dalam keberhasilan implementasi IKD, sehingga optimalisasi sosialisasi dan peningkatan infrastruktur digital diperlukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini.

Berdasarkan teori implementasi kebijakan Edward III, implementasi IKD di Kabupaten Sidenreng Rappang memperlihatkan keterkaitan erat antara komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berikut adalah penjabaran masing-masing faktor:

Komunikasi

Hasil analisis dalam bentuk visualisasi diagram menunjukkan bahwa komunikasi menjadi faktor penting dalam implementasi IKD di Kabupaten Sidenreng Rappang. Diagram matrix coding menggambarkan referensi terkait komunikasi tersebar merata di antara para responden, dengan jumlah tertinggi pada Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data serta masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data, upaya sosialisasi telah dilakukan melalui platform digital, media cetak dan komunikasi langsung. Namun, upaya tersebut masih menghadapi tantangan signifikan, terutama di wilayah pedesaan yang memiliki keterbatasan akses terhadap teknologi.

Strategi komunikasi yang diterapkan meliputi penggunaan platform media sosial seperti WhatsApp, Instagram dan Facebook. Di sisi lain, pendekatan konvensional seperti program jemput bola ke desa-desa tetap dipertahankan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang belum familiar dengan teknologi digital. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu informan dari masyarakat, pendekatan tatap muka masih sangat dibutuhkan terutama di wilayah terpencil karena keterbatasan literasi digital. Hal ini sesuai dengan teori Edward III yang menyatakan bahwa komunikasi yang efektif dapat meningkatkan pemahaman dan

penerimaan kebijakan. Namun, keterbatasan akses teknologi di daerah pedesaan menghambat penyebaran informasi.

Sumber Daya

Hasil analisis menunjukkan bahwa sumber daya, baik sumber daya manusia maupun teknologi, menjadi faktor penting dalam implementasi IKD. Kompetensi sumber daya manusia dinilai memadai, didukung oleh pelatihan seperti bimbingan teknis (bimtek) yang diadakan di tingkat pusat dan provinsi. Hal ini konsisten dengan teori Edward III, yang menekankan bahwa sumber daya yang memadai sangat diperlukan untuk implementasi kebijakan yang efektif.

Dari segi infrastruktur, server dan perangkat pendukung telah disediakan oleh pemerintah pusat. Namun, beberapa kendala teknis masih dihadapi, terutama jaringan internet yang tidak stabil di beberapa wilayah terpencil. Aspek keamanan data menunjukkan hasil yang optimal melalui implementasi sistem enkripsi dan prosedur keamanan berlapis. Namun, ketiadaan alokasi anggaran khusus membatasi fleksibilitas pengembangan program.

Disposisi

Hasil analisis menunjukkan bahwa disposisi, yang merepresentasikan sikap dan komitmen para pegawai serta respon masyarakat, memiliki peran krusial dalam implementasi IKD. Sikap pegawai Disdukcapil sangat mendukung program ini, terlihat dari komitmen kuat mereka, termasuk partisipasi dalam pelatihan dan aktivasi IKD. Hal ini sesuai dengan teori Edward III menjelaskan bahwa keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada kesiapan dan penerimaan aktor yang terlibat.

Dari sisi masyarakat, respon awal terhadap program ini cukup positif, meskipun belum sepenuhnya signifikan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang manfaat dan kegunaan program, yang memerlukan sosialisasi lebih intensif. Antusiasme masyarakat dapat meningkat ketika mereka memahami kemudahan dan manfaat praktis dari IKD, seperti keamanan data dan aksesibilitas dokumen secara digital.

Upaya untuk meningkatkan disposisi melibatkan pelatihan berkelanjutan bagi pegawai dan intensifikasi sosialisasi di berbagai wilayah. Program ini diharapkan dapat lebih diterima luas dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya

transformasi digital dalam administrasi kependudukan.

Struktur Birokrasi

Hasil analisis menunjukkan bahwa struktur birokrasi dalam implementasi IKD cukup baik. Mekanisme koordinasi antar unit atau bidang di Disdukcapil berlangsung lancar, didukung oleh pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan peran masing-masing pegawai.

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang digunakan mengikuti SOP pelayanan dokumen kependudukan yang sudah ada, sehingga memberikan panduan yang terstruktur dalam pelaksanaan program. Aktor kunci dalam implementasi ini adalah para operator yang bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis.

Koordinasi antar instansi terkait, baik pemerintah maupun swasta, dinilai cukup baik, meskipun masih perlu ditingkatkan untuk memastikan penerapan menyeluruh IKD dalam berbagai layanan administrasi. Selain itu, prosedur yang terorganisasi dengan baik telah mendukung kelancaran proses, meskipun masih terdapat peluang untuk meningkatkan efisiensi, terutama dalam hal aksesibilitas layanan. Hal ini sesuai dengan teori Edward III yang menekankan bahwa struktur birokrasi yang jelas dan fleksibel dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan.

Faktor Pendukung

Faktor pendukung dari Implementasi IKD di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng, meliputi:

- 1) Kompetensi Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia yang kompeten, didukung pelatihan seperti Bimbingan Teknis (Bimtek), menjadi faktor kunci dalam implementasi IKD. Pegawai menunjukkan komitmen tinggi dalam melaksanakan program.
- 2) Infrastruktur Teknologi
Penyediaan server, perangkat pendukung dan keamanan data oleh pemerintah pusat menjadi landasan penting dalam mendukung implementasi IKD.

Faktor Penghambat

Adapun faktor penghambat dari implementasi IKD di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, meliputi:

- 1) Rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat

Banyak masyarakat yang belum memahami manfaat IKD, sehingga tingkat adopsi masih sangat rendah (hanya 2,8%).

- 2) Sosialisasi yang belum merata
Sosialisasi belum mencakup seluruh wilayah, terutama daerah terpencil, sehingga banyak masyarakat yang tidak mendapatkan informasi memadai tentang program ini.
- 3) Keterbatasan infrastruktur jaringan
Jaringan internet yang tidak stabil di beberapa wilayah menjadi hambatan dalam proses aktivasi dan penggunaan IKD.
- 4) Proses aktivasi yang mensyaratkan kehadiran langsung di kantor Disdukcapil
Keharusan masyarakat datang langsung ke kantor Disdukcapil untuk aktivasi menjadi kendala, terutama bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat layanan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi IKD menghadapi tantangan utama dalam komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam aspek komunikasi, penelitian ini mengkonfirmasi temuan Syafa Armia Zafira & Oktarizka Reviandani (2024) bahwa keterbatasan akses teknologi di daerah terpencil menjadi hambatan dalam kebijakan digital. Namun, penelitian ini menambahkan bahwa strategi komunikasi digital dan tatap muka diperlukan untuk menjangkau seluruh masyarakat.

Dari sisi sumber daya, temuan ini sejalan dengan Sasongko (2023) yang menekankan pentingnya infrastruktur dalam adopsi layanan digital. Namun, berbeda dengan Salopah (2024) yang menemukan bahwa dukungan anggaran di Kota Bogor mempercepat implementasi kebijakan, penelitian ini menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam pengembangan IKD di Sidenreng Rappang.

Dalam aspek disposisi, penelitian ini mendukung temuan Syafa Armia Zafira dan Oktarizka Reviandani (2024) bahwa kurangnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat kebijakan digital menghambat adopsi. Namun, penelitian ini lebih lanjut menunjukkan bahwa tingkat adopsi masih sangat rendah (2,8%), meskipun pegawai Disdukcapil telah menunjukkan komitmen tinggi dalam implementasi program.

Struktur birokrasi dalam penelitian ini cukup baik, tetapi masih perlu lebih fleksibel untuk mendukung kebijakan digital, terutama dalam mempermudah akses aktivasi IKD bagi

masyarakat di daerah terpencil. Hal ini berbeda dengan temuan Salopah (2024) yang menunjukkan bahwa birokrasi berbasis layanan digital mampu mempercepat implementasi kebijakan.

Implikasi dari temuan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan digital memerlukan pendekatan yang lebih adaptif terhadap kondisi lokal. Dalam konteks teori Edward III, penelitian ini menekankan bahwa komunikasi dan sumber daya harus diperkuat untuk meningkatkan efektivitas kebijakan. Selain itu, temuan ini juga memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan digital bergantung pada interaksi yang kompleks antara faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Oleh karena itu, strategi yang lebih komprehensif diperlukan untuk memastikan bahwa implementasi IKD dapat berjalan optimal di berbagai kondisi wilayah.

PENUTUP

Berdasarkan analisis implementasi Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, dapat disimpulkan bahwa program ini berjalan kurang optimal, dengan tingkat adopsi hanya mencapai 2,08% dari jumlah penduduk yang memiliki e-KTP. Meskipun terdapat dukungan positif dari struktur birokrasi dan kompetensi SDM, implementasi terhambat oleh empat faktor utama yaitu, rendahnya kesadaran masyarakat tentang manfaat program, sosialisasi yang belum merata, keterbatasan infrastruktur jaringan di wilayah terpencil serta proses aktivasi yang mengharuskan datang ke kantor Disdukcapil. Oleh karena itu, diperlukan strategi adaptif, seperti sosialisasi berbasis komunitas, peningkatan infrastruktur digital, serta penyederhanaan proses aktivasi.

Secara praktis, penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan digital harus disesuaikan dengan kesiapan masyarakat dan infrastruktur yang tersedia. Secara teoretis, studi ini memperkuat model implementasi Edward III dengan menyoroti interaksi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam kebijakan digital.

Rekomendasi utama mencakup perluasan jaringan internet, aktivasi IKD berbasis daring, integrasi dengan layanan publik lainnya, serta regulasi daerah yang lebih mendukung. Untuk penelitian selanjutnya, diperlukan kajian efektivitas sosialisasi, pengaruh faktor sosial

terhadap adopsi IKD, serta pengembangan sistem teknologi yang lebih inklusif. Dengan langkah-langkah ini, IKD diharapkan dapat diterima lebih luas, meningkatkan efisiensi layanan kependudukan, dan mempercepat transformasi digital di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (I). Syakir Media Press.
- Ahmad, J. (2015). *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasi*. Gava Media.
- Amin, N. F., Garancang, S., & Abunawas, K. (2023). Konsep Umum Populasi dan Sampel dalam Penelitian. *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 14(1), 15–31. <https://doi.org/10.21070/2017/978-979-3401-73-7>
- Amrih, Sinrang, A., & Erfina. (2024). Peningkatan Kualitas Pelayanan Kependudukan melalui Transformasi Digital di Kantor Kecamatan Kulo. *Al Qisthi : Jurnal Sosial Dan Politik*, 14(2), 128–138.
- Asrulla, Risnita, Jailani, M. S., & Jeka, F. (2023). Populasi dan Sampling (Kuantitatif), Serta Pemilihan Informan Kunci (Kualitatif) dalam Pendekatan Praktis. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 26320–26332.
- Azzahra, V., & Rudiana. (2024). Strategi Pemerintah Dalam Penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon. *Unes Law Review*, 6(4), 10146–10157. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/un-esrev.v6i4>
- Bella, V. S., & Widodo, D. (2023). Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Menunjang Pelayanan Publik Masyarakat Di Kecamatan Tambaksari. *Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 14–31. <https://doi.org/10.55542/saraqopat.v6i1.833>
- Disdukcapil Sulsel. (2024). *Jumlah Registrasi IKD*. <https://dukcapil.sulselprov.go.id/>
- Fauzan, A. (2024). Model Model Implementasi Kebijakan Publik. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3).
- Hadi, I., Ayu, I., & Sri, P. (2024). Modernisasi dan Digitalisasi Public Service : Mewujudkan Indonesia Emas Melalui Harmonisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). *Jurnal Kridatama Sains Dan Teknologi*, 06(02), 639–658.
- Muhammad Rusydi, & Dadang Mashur. (2024). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. *Journal of Research and Development on Public Policy*, 3(3), 189–198. <https://doi.org/10.58684/jarvic.v3i3.166>
- Nuraeni, N., & Syahrudin, D. (2024). Efektivitas Pelayanan Pembuatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur. *Karimah Tauhid*, 3(11), 12653–12661.
- Nurdiana, I., & Ayumi, K. (2024). Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Disdukcapil Kota Tanjungpinang. *Jurnal Pengabdian Dan Solidaritas Masyarakat*, 1(2), 50–58. <https://doi.org/10.62383/harmoni.v1i2.141>
- Priyatni, E. T., Suryani, A. W., Rifka, F., Achmad, S., & Imbalan, Z. (2020). Pemanfaatan NVIVO dalam Penelitian Kualitatif. In *Pusat Pendidikan LP2M Universitas Negeri Malang*.
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81–95. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i3.3.2374>
- Salopah, Purnamasari, I., & Ramdani, F. T. (2024). Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Bogor. *Karimah Tauhid*, 3(4), 4761–4775.
<https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i4.12926>

Sasongko, R. W. (2023). Implementasi Identitas Kependudukan Digital Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Registratie*, 5(1), 69–86.
<https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v5i1.3148>

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Syafa Armia Zafira, & Oktarizka Reviandani. (2024). Implementasi Pelayanan Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(6), 3007–3014.
<https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i6.2099>

Yulanda, A., & Frinaldi, A. (2023). Inovasi Program Identitas Kependudukan Digital dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Layanan Kependudukan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Humaniora*, 7(2), 415–426.

Zahro, A. A., & Wahyuni, E. S. (2024). Transformasi E-KTP menjadi KTP Digital melalui Aplikasi Identitas. *Governance: Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 14(2), 63–71.

Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, B. (2018). Tipe Penelitian Deskripsi dalam Metode Penelitian. *Diakom: Jurnal Media Dan Komunikasi*, 1(2), 83–90.